

Pengambilan Keputusan Berbasis Data dan Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pendidikan di Kementerian Dikdasmen

Mohamad Hilal Nu'man*, Yayan Andri¹, Alvi Kania Gustiane*, Jasmine Orien Azzahra*, Puput Amelya Putri*

Email: hilalnuman@umbandung.ac.id, yayanandri@umbandung.ac.id, alvikaniagustiane0775@gmail.com, jasmineorienaz@gmail.com, pptamlyputri@gmail.com.

Abstrak

Pengambilan keputusan berbasis data telah menjadi pendekatan strategis dalam pengelolaan kebijakan pendidikan di era modern. Namun, tantangan tetap muncul ketika pendekatan ini harus diselaraskan dengan kearifan lokal yang menjadi bagian penting dari konteks sosial dan budaya Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana integrasi antara data yang terukur dan kearifan lokal dapat memberikan solusi yang lebih adaptif dalam merumuskan kebijakan pendidikan, dengan fokus pada studi kasus di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi proses pengambilan keputusan, tantangan, dan hasil implementasi kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa penerapan data yang valid dan relevan, ketika digabungkan dengan nilai-nilai kearifan lokal, mampu menciptakan kebijakan yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Juga merekomendasikan strategi kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pendidikan untuk memastikan harmonisasi antara inovasi berbasis data dan penghormatan terhadap kearifan lokal.

Kata Kunci: pengambilan keputusan berbasis data, kearifan lokal, kebijakan pendidikan, Kementerian Dikdasmen, inklusivitas.

Abstract

Data-driven decision-making has become a strategic approach in managing educational policies in the modern era. However, challenges arise when this approach must be aligned with local wisdom, which plays a crucial role in Indonesia's social and cultural context. This article explores how the integration of measurable data and local wisdom can provide more adaptive solutions in formulating educational policies, focusing on a case study at the Ministry of Primary and Secondary Education (Dikdasmen). This study employs a qualitative

*Universitas Muhammadiyah Bandung

*Universitas Muhammadiyah Bandung

*Universitas Muhammadiyah Bandung

*Universitas Muhammadiyah Bandung

*Universitas Muhammadiyah Bandung

descriptive analysis method with a case study approach to examine the decision-making process, challenges, and outcomes of policy implementation. The findings reveal that the application of valid and relevant data, when combined with local wisdom values, can create inclusive, effective, and sustainable policies. It also recommends collaborative strategies involving various stakeholders in designing educational policies to ensure the harmonization of data-driven innovation and respect for local wisdom.

Keywords: *data-driven decision-making, local wisdom, educational policy, Ministry of Primary and Secondary Education, inclusivity.*

Pendahuluan

Adanya proses yang digerakkan oleh pemimpin untuk menetapkan kebijakan dan mencapai keputusan merupakan indikasi keberhasilan suatu lembaga (Sutikno et, 2022). Kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan dua elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kebijakan cenderung bersifat teoritis, sedangkan pengambilan keputusan lebih bersifat praktis (Sabri, 2013). Pengambilan keputusan yang tidak berlandaskan teori dapat mengurangi nilai keilmiahan dari keputusan tersebut. Sebaliknya, kebijakan yang tidak diiringi oleh pengambilan keputusan akan sulit untuk dicapai.

Pengambilan keputusan adalah proses akhir dari sebuah pemikiran terkait permasalahan yang dianggap sebagai penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan, dengan memilih salah satu solusi yang ada. Pengambilan keputusan merupakan sebuah pendekatan sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan (Anwar, 2014) dalam (Rinaldi, 2023). Dengan demikian, pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai proses memilih alternatif solusi dari berbagai opsi yang telah dirumuskan. Keputusan yang diambil harus bersifat analitis, fleksibel, dan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia (Hayati et al., 2021).

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindak lanjuti atau

untuk digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah (Pasolong, 2023). Pengambilan keputusan dalam kebijakan pendidikan merupakan proses yang sangat krusial dalam menentukan arah dan kualitas sistem pendidikan di suatu negara (Hayati et., 2021). Di Indonesia, proses ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari data empiris hingga nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan informasi teknologi, pengambilan keputusan berbasis data (data-driven Decision Making) semakin menjadi hal yang penting untuk menjamin kebijakan pendidikan yang lebih akurat, terukur, dan efektif. Data yang relevan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan pendidikan, tantangan yang dihadapi, serta keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

Namun, dalam konteks Indonesia yang sangat kaya akan keragaman budaya dan tradisi, tidak dapat disangkal bahwa kearifan lokal juga memainkan peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan. Kearifan lokal merupakan nilai budaya yang dianggap sakral dalam suatu hukum adat di masyarakat yang secara spontan tumbuh dan berkembang dengan sejalannya waktu (Handayani et al., 2022). Kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai tradisional dan lokal yang telah berkembang dalam masyarakat selama berabad-abad dan memiliki dampak yang signifikan terhadap cara masyarakat memandang pendidikan. Oleh karena itu, integrasi data dan kearifan lokal ke dalam proses pengambilan keputusan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) menjadi suatu tantangan dan peluang untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang berbasis pada penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk melakukan penelitian kepustakaan ini, buku-buku, kamus, jurnal, makalah, dan karya tulis lain yang relevan dikaji atau diteliti. Topik-topik yang dibahas di sini terkait

dengan Pengambilan Keputusan Berbasis Data dan Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pendidikan: Studi Kasus di Kementerian Dikdasmen.

Hasil dan Pembahasan

Pengambilan sebuah keputusan dapat didasari dari dua aspek, pertama aspek individu di mana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh atasan secara sendiri sedangkan aspek keduanya adalah kelompok. Pengambilan keputusan secara kelompok dapat dilakukan oleh sekelompok orang melalui musyawarah dalam mengambil keputusan, pengambilan keputusan secara kelompok dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis: keputusan oleh sekelompok pemimpin atau atasan, keputusan bersama antara pemimpin dan anggota kelompok, serta keputusan oleh sekelompok individu dengan kedudukan yang setara.

Dari dua aspek pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengambilan keputusan, baik secara individu maupun kelompok, memiliki karakteristik dan keunggulannya masing-masing. Keputusan individu biasanya lebih cepat dan mencerminkan pandangan pribadi pembuatnya, namun dapat terbatas dalam perspektif. Sementara itu, pengambilan keputusan kelompok melibatkan berbagai pandangan yang dapat memperkaya solusi, meskipun prosesnya cenderung memakan waktu lebih lama dan membutuhkan koordinasi. Pilihan antara kedua metode ini tergantung pada sifat masalah, urgensi, dan konteks pengambilan keputusan.

1. Kearifal Lokal

Faturrahman (2012:46) dalam (Ashary Ramdhani, 2022) menegaskan bahwa budaya berperan penting dalam mendukung perkembangan peserta didik, dimulai dari budaya lokal, meluas ke budaya nasional, hingga budaya universal. Keterasingan dari budaya lokal membuat peserta didik sulit mengenali budaya bangsanya, kehilangan identitas, dan menjadi rentan terhadap pengaruh budaya asing tanpa pertimbangan matang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya norma dan nilai

budaya nasional sebagai landasan berpikir. Meski kebudayaan penting dalam pembelajaran, praktik pendidikan sering kali lebih menekankan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengabaikan akar budaya lokal. Oleh karena itu, integrasi kearifan lokal diharapkan dapat menjadikan pembelajaran lebih relevan, mudah dipahami, dan dekat dengan peserta didik, sekaligus memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. (Endraswara, 2010:1) menyatakan Kearifan lokal (lokal wisdom) mencakup pandangan hidup, pengetahuan, dan strategi kehidupan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan mereka (Endraswara, 2010:1). Selain itu, kearifan lokal juga mencerminkan sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lingkungan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai dasar pendidikan, kearifan lokal memiliki nilai penting karena mengedepankan aspek humanistik dan mencerminkan ajaran kebatinan yang luhur. Kearifan lokal merupakan karakteristik masyarakat berbudaya tinggi, berupa kebijaksanaan dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi serta pedoman hidup yang diwariskan secara turun-temurun (Anggraisa et al., n.d.).

Integrasi kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan sangat penting karena membantu peserta didik mengenali dan memahami nilai-nilai budaya di lingkungannya. Pembelajaran berbasis kearifan lokal tidak hanya mendorong pembelajaran yang efektif dan kontekstual, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap budaya sendiri sekaligus membentuk karakter peserta didik. Guru dan dosen memiliki peran besar dalam keberhasilan pendidikan karakter ini, didukung oleh peran orang tua di rumah dalam menciptakan generasi yang berkepribadian baik. Dengan demikian, pendidikan berbasis kearifan lokal dapat menciptakan harmoni dan keberlanjutan dalam pembelajaran,

sekaligus membangun budaya hidup yang positif bagi peserta didik (Ashary Ramdhani, 2022).

2. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan secara etimologis berasal dari kata Yunani *polis*, yang berarti kota, dan berkaitan dengan gagasan pengaturan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan mencakup keputusan formal yang bersifat umum, mengikat, dan mengatur perilaku masyarakat atau anggota organisasi dengan tujuan menciptakan tata nilai baru. Kebijakan berbeda dari hukum dan peraturan karena lebih adaptif, interpretatif, dan fleksibel dalam penerapannya, meskipun tetap mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, kebijakan bersifat proaktif dan berorientasi pada penyelesaian masalah, dirancang untuk berlaku secara umum namun tetap mempertimbangkan kekhasan lokal sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik yang ada (Mauliddiyah, 2021).

Menurut (Risnawan, 2017), Kebijakan adalah aktivitas politik yang dirancang secara sadar, bijaksana, dan terarah oleh organisasi, lembaga, atau instansi pemerintah untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dan panduan dalam berbagai aspek kehidupan, membantu mengarahkan aktivitas serta membatasi perilaku agar lebih terstruktur. Dalam sistem pendidikan, kebijakan ini dikenal sebagai kebijakan pendidikan, yang dirancang untuk mengatur, mengarahkan, dan memperbaiki praktik pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan (Farkhan et al., 2022).

3. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang membedakannya dengan kebijakan lainnya. Adapun karakteristik kebijakan pendidikan yaitu:

- a. *Memiliki Tujuan Pendidikan:* Kebijakan pendidikan harus dirancang dengan tujuan khusus yang relevan dengan bidang pendidikan. Tujuan tersebut perlu disusun secara terarah, jelas, dan memberikan panduan

yang konkret mengenai kontribusi kebijakan tersebut terhadap pengembangan dunia pendidikan.

- b. *Terpenuhinya aspek legal dan Formal:* Sebelum diterapkan, kebijakan pendidikan harus memenuhi prasyarat tertentu agar dapat dianggap sah dan diakui. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut disahkan melalui mekanisme konstitusional sesuai dengan hierarki peraturan yang berlaku. Proses ini memberikan legitimasi yang diperlukan bagi kebijakan pendidikan untuk dijalankan secara resmi.
- c. *Memiliki konsep operasional:* Kebijakan pendidikan adalah serangkaian panduan yang bersifat umum, sehingga harus memiliki manfaat operasional yang dapat diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dirancang dengan konsep operasional yang jelas agar pencapaian tujuannya dapat diukur secara terstruktur dan terarah.
- d. *Dibuat oleh yang berwenang:* Kebijakan pendidikan dirumuskan oleh para ahli yang memiliki hak dan wewenang dalam proses pembuatannya. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah munculnya permasalahan baru yang dapat timbul akibat kebijakan yang diimplementasikan.
- e. *Dapat di evaluasi:* Kebijakan pendidikan harus bersifat evaluatif. Kebijakan yang dinilai baik dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitasnya, sementara kebijakan yang mengandung kekurangan atau kesalahan perlu diperbaiki agar dapat memenuhi tujuannya dengan lebih baik.
- f. *Memiliki sistematika:* Kebijakan pendidikan harus disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait di dalamnya. Sistematika ini perlu mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan. Selain itu, kebijakan harus menghindari sifat pragmatis dan diskriminatif, serta memiliki struktur yang kokoh. Hal

ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak mengalami cacat hukum, baik dari segi internal maupun eksternal.

4. Analisis Pengambilan Keputusan Berbasis Data dan Kearifan Lokal

Menurut (Iswatiningsih, 2019), yang dikutip dari (Nurasiah et al., 2022). (1), ada norma-norma yang berkembang secara lokal seperti perilaku, tabu-tabu, dan kewajiban orang Jawa; (2), ada masyarakat dan ritual adat serta nilai-nilai yang dianut bersama; (3), ada cerita rakyat, legenda, dan kisah tradisional yang mengandung pelajaran atau pesan yang dihargai oleh masyarakat setempat; (4), ada informasi, data, dan pengetahuan yang dikumpulkan dari masyarakat senior, pemimpin adat, dan pemimpin spiritual; (5), ada rencana atau buku kebenaran masyarakat; (6), ada sarana yang digunakan oleh masyarakat setempat; (7), ada bahan-bahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan; dan (8), ada sumber daya lingkungan. Kearifan lokal berperan penting dalam membangun modal manusia yang unggul. Sebuah bangsa yang berbudi pekerti luhur tercermin dari perilaku masyarakatnya yang bertindak dengan kesadaran penuh, pengendalian diri, dan mengurangi ego primordial. Kearifan lokal berfokus pada upaya menekan hasrat, beradaptasi dengan lingkungan, dan mendukung tatanan moral yang agung. Pendidikan dan pengembangan intelektual lokal tidak akan sukses tanpa dukungan masyarakat yang optimis dan partisipatif. Mengajak berbagai sektor masyarakat untuk aktif terlibat dalam pendidikan adalah kontribusi berharga yang perlu diapresiasi.

Beberapa bentuk kearifan lokal yang mendukung pemeliharaan pendidikan di ruang publik meliputi upaya menjaga kerukunan antar umat melalui gotong royong serta penerapan nilai-nilai Pancasila yang sejalan dengan kearifan lokal dalam sikap dan tindakan, menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Namun, di tengah globalisasi, penerapan nilai Pancasila berbasis kearifan lokal mulai mengalami perubahan, mengarah pada perilaku menyimpang seperti

merokok, penyalahgunaan narkoba, westernisasi, serta perilaku yang tidak mencerminkan nilai luhur tersebut. Lunturnya nilai Pancasila dalam masyarakat menunjukkan tanda awal kemerosotan moral, spiritual, dan etika sosial, terutama di kalangan generasi yang permisif. Hal ini memunculkan pandangan sempit, ketidakmampuan menyelesaikan perbedaan, dan resistensi terhadap perubahan, yang pada akhirnya berpotensi memicu tindakan anarkis.

Program Sekolah Penggerak bertujuan mewujudkan profil siswa Pancasila melalui nilai-nilai kearifan lokal, dengan melibatkan kerjasama antara sekolah dan berbagai stakeholder. Siswa berpartisipasi dalam proyek yang disiapkan oleh guru yang mencakup kearifan lokal sebagai bagian dari paradigma pendidikan baru yang diarahkan pada profil siswa Pancasila. Lingkungan belajar yang berkelanjutan, pembentukan karakter yang kuat, dan pemeliharaan kompetensi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal adalah tujuan dari kurikulum pembelajaran mandiri, yang berupaya untuk menyelidiki kompetensi siswa berdasarkan minat, bakat, dan keragaman global di lingkungan sekitar mereka. Kearifan lokal, untuk melestarikan karakter bangsa, kurikulum pendidikan harus memuat pengembangan karakter suatu daerah. Semua pihak yang terlibat harus bekerja sama untuk menjalankan kurikulum pembelajaran mandiri agar peserta didik Pancasila dapat mencapai potensinya secara maksimal. Kurikulum ini mencakup pembelajaran akademis dan ekstrakurikuler, serta pendidikan karakter (Nurasiah et al., 2022).

Wisnumurti (2008: 32) menyatakan ada beberapa nilai kearifan yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran di sekolah, diantaranya :

- a. Nilai kearifan lokal Tri Hita Karana mencerminkan prinsip kosmopolit yang mengharmonikan hubungan manusia dengan Tuhan (parhyangan), antar sesama manusia (pawongan), dan dengan alam (palemahan). Nilai ini berperan dalam memelihara hubungan sosial di lingkungan sekolah secara dinamis.

- b. Dengan menyatukan ucapan, perbuatan, dan pikiran, Tri Kaya Parisuda mencontohkan keselarasan yang diperlukan untuk mengembangkan karakter dan jati diri seseorang. Anggota masyarakat yang berkarakter, konsisten, dan bertanggung jawab adalah buah dari nilai ini.
- c. Tat Twam Asi, yang berarti "kamu adalah aku dan aku adalah kamu," adalah nilai kearifan lokal yang mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan martabat yang sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Prinsip ini merupakan dasar bagi masyarakat demokrasi modern yang sedang berkembang.
- d. Dalam masyarakat di mana setiap orang memperlakukan satu sama lain dengan bermartabat dan hormat, nilai-nilai kearifan lokal Salunglung Sabayantaka dan Paras Paros Sarpanaya menekankan pentingnya bekerja sama sebagai satu kesatuan.
- e. Bhineka Tunggal Ika mengajarkan sikap sosial yang mengakui kebersamaan di tengah perbedaan dan perbedaan dalam kebersamaan. Semangat ini sangat relevan dalam kehidupan sosial yang multikultural.
- f. Dalam Menyama Braya, kita temukan konsep persaudaraan, kesetaraan, dan pengakuan sosial atas kemanusiaan kita bersama. Nilai sosial ini mendorong gagasan bahwa kita semua adalah saudara dan saudari di saat senang maupun susah.

Nilai kearifan lokal yang diterapkan dalam pembelajaran dapat mencerahkan siswa, karena belajar yang selaras dengan energi positif kehidupannya lebih bermanfaat dibandingkan mempelajari hal-hal yang tidak jelas. Pembelajaran berbasis kearifan lokal sangat tepat karena mengarah pada tujuan besar, yaitu pencapaian keselamatan (safety). Nilai-nilai tersebut akan bermakna jika tetap dijadikan rujukan dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial, terutama dalam mengatasi perbedaan yang berpotensi memicu konflik. Mengingat peran pentingnya dalam dunia pendidikan, nilai kearifan lokal sebaiknya ditanamkan sejak dini di sekolah, sebagai pedoman

dalam menghadapi kehidupan sosial yang terus berkembang (suarningsih, 2019).

5. Implementasi di Kementerian Dikdasmen

- a. Kombinasi Data dan Kearifan Lokal: Kementerian Dikdasmen dapat menggunakan data pendidikan untuk menentukan daerah yang memerlukan perhatian khusus, sementara kearifan lokal membantu merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
- b. Pelibatan Pemangku Kepentingan Lokal: Melibatkan tokoh adat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan memastikan keberlanjutan dan penerimaan kebijakan.
- c. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan berbasis data dan lokalitas untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kebutuhan akan penyesuaian.

Kesimpulan

Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan data empiris untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan, akurat, dan terukur. Data tersebut menjadi alat penting untuk memahami kebutuhan pendidikan, mengidentifikasi tantangan, serta mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang telah diterapkan. Namun, dalam konteks Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi, pengambilan keputusan yang hanya mengandalkan data tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal berpotensi kurang efektif. Kearifan lokal memiliki peran signifikan dalam menjaga relevansi kebijakan dengan nilai-nilai tradisional masyarakat. Nilai-nilai seperti Tri Hita Karana, Bhineka Tunggal Ika, dan Tat Twam Asi menjadi landasan dalam membangun harmoni sosial dan karakter peserta didik. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan dan kurikulum pendidikan, pembelajaran tidak hanya menjadi lebih kontekstual dan dekat

dengan kehidupan sehari-hari, tetapi juga menciptakan generasi yang mencintai budaya lokal dan memiliki identitas yang kuat.

Kementerian Dikdasmen berupaya mengombinasikan data pendidikan dengan kearifan lokal dalam merancang kebijakan. Langkah ini melibatkan pemangku kepentingan lokal seperti tokoh adat, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan berkelanjutan. Selain itu, proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan serta melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Melalui implementasi kurikulum seperti Program Sekolah Penggerak dan kurikulum Merdeka Belajar, pendidikan berbasis kearifan lokal diarahkan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Peserta didik dilibatkan dalam pembelajaran yang berbasis proyek, sehingga dapat mengembangkan kompetensi, minat, dan bakat mereka, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai budaya. Dengan pendekatan ini, kebijakan pendidikan diharapkan mampu menciptakan sistem yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Ditujukan Peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses pemberian informasi untuk penelitian ini.

Daftar Rujukan

Anggraisa, A., Nurlidiya, E., Sativa, O., Kholiza, T., & Putri, N. (n.d.).

Mengintegrasikan Kearifan Lokal Dalam Kurikulum Pendidikan.

Anwar, H. (2014). Proses Pengambilan Keputusan untuk Mengembangkan Mutu Madrasah. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 37–56.

<https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.1.569>

Ashary Ramdhani, K. W. (2022). Tradisi Keislaman dalam Penguatan Nilai

- Kearifan Lokal di Era Disrupsi. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 10(1), 136–146.
- Farkhan, A., Rahmah, A., Alwatasi, U., & Setiawan, F. (2022). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1921. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>
- Handayani, H., Harmawati, Y., Widhiastanto, Y., & Jumadi, J. (2022). Relevansi Nilai Kearifan Lokal Sebagai Pendidikan Moral. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 114–120.
- Hayati, F., Zulvira, R., & Gistituati, N. (2021). Lembaga pendidikan: kebijakan dan pengambilan keputusan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 100. <https://doi.org/10.29210/3003911000>
- Mauliddiyah, N. L. (2021). *KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA*. 3(25), 6.
- Nurasiah, I., Marini, A., Nafiah, M., & Rachmawati, N. (2022). Nilai Kearifan Lokal: Projek Paradigma Baru Program Sekolah Penggerak untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3639–3648. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2727>
- Pasolong, D. H. (2023). Teori Pengambilan Keputusan. In *Penerbit Alfabeta, Bandung (x)*.
- Rinaldi, A. (2023). Knowledge Management Melalui Pendekatan Fuzzy Multi-Kriteria. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 2023.
- Sabri, A. (2013). Kebijakan Dan Pengambilan Keputusan Dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Ta Lim Journal*, 20(2), 373–379. <https://doi.org/10.15548/jt.v20i2.34>
- suarningsih. (2019). *Peranan Pendidikan Berbasis Kearifan lokal dalam Pembelajaran di Sekolah Ni Made Suarningsih*. 2, 1–23.
- Sutikno, Y., Hosan, H., & Irawati, I. (2022). Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Maitreyawira*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.69607/jm.v3i1.46>